

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori yang menjadi landasan penelitian. Kemudian teori yang akan dijelaskan akan digunakan untuk memahami hubungan antara variabel indeks pembangunan gender terhadap keharmonisan keluarga di Indonesia.

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Pembangunan Inklusif

Sachs (2004), mengungkapkan bahwa pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat utama dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal secara ekonomi maupun sosial. Konsep pembangunan inklusif mencakup aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya yang saling berkaitan untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh melalui akses yang setara terhadap peluang dan manfaat pembangunan (Stewart, 2013).

Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi dilihat dari sejauh mana setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk memperbaiki taraf hidupnya, sehingga pembangunan yang inklusif mampu menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan mampu menikmati hasil pembangunan secara merata. Pembangunan inklusif juga menekankan penghapusan eksklusi terhadap kelompok tertentu, dengan mendorong pemerataan akses, kesempatan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Gupta & Ros-tonen, 2015).

Cypher (2014) berpendapat bahwa tujuan dari pembangunan inklusif adalah memberikan kesempatan dan akses yang merata bagi seluruh masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan menikmati hasil pembangunan. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Elson & Seth, 2019). Oleh karena itu, pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada pemerataan manfaat pembangunan, tetapi juga menekankan pentingnya kesetaraan gender agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara adil dan memperoleh manfaat pembangunan secara merata.

2.1.2 Kesetaraan Gender

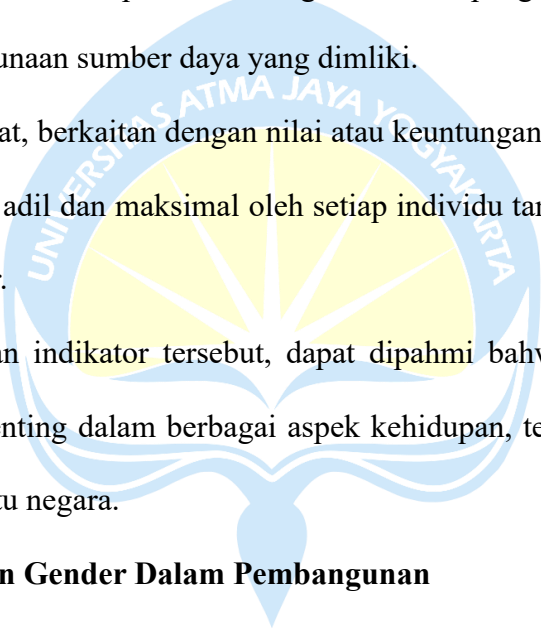
1. Pengertian Kesetaraan Gender

Kata "gender" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Gender menunjukkan perbedaan peran, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh sosial dan budaya, bukan berdasarkan kodrat ataupun pemberian Tuhan.

Fakih (2008) menjelaskan bahwa gender merupakan sifat dan peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Konsep ini berbeda dengan jenis kelamin (*sex*)

yang merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sementara itu, gender bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan kondisi sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Tanjung et al., (2024) yang menyatakan bahwa peran gender menggambarkan cara masyarakat menilai dan mengatur peran laki-laki dan perempuan misalnya, laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Pemahaman terhadap konsep gender dianggap penting, karena melalui pemahaman tersebut laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam keluarga maupun masyarakat

Menurut Hayati & Supartiningsih (2020), kesetaraan gender merupakan kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia, sehingga keduanya dapat berperan aktif dan berpartisipasi secara seimbang dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan politik sekaligus memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Melalui kesetaraan gender, setiap individu diharapkan dapat berpartisipasi secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender akan terwujud apabila perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, dan kontrol yang sama terhadap proses pembangunan. beberapa indikator yang mencerminkan kesetaraan gender antara lain menurut (Tanjung et al., 2024):

- 
- a) Akses, yaitu kesempatan atau peluang individu untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya tertentu. Penting untuk memastikan bahwa akses tersebut diberikan secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.
 - b) Partisipasi, mencerminkan tingkat keterlibatan atau keikutsertaan individu maupun kelompok dalam berbagai kegiatan serta proses pengambilan keputusan pembangunan.
 - c) Kontrol, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi atau menentukan penggunaan sumber daya yang dimiliki.
 - d) Manfaat, berkaitan dengan nilai atau keuntungan yang dapat dinikmati secara adil dan maksimal oleh setiap individu tanpa adanya perbedaan gender.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat dipahami bahwa kesetaraan gender memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembangunan suatu negara.

2. Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Kesetaraan gender memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Suharjuddin (2020) menyatakan bahwa pembangunan bertujuan menciptakan kehidupan yang makmur, adil dan sejahtera melalui peningkatan kualitas manusia, sehingga hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Kesetaraan gender menjadi penting karena memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta dapat

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang mengabaikan kesetaraan gender dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan menghambat kemajuan ekonomi. Hayati & Supartiningsih (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang, sehingga perempuan belum sepenuhnya memperoleh akses dan kesempatan yang sama. Kondisi ini dapat menyebabkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat khususnya perempuan, belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal keterlibatan perempuan secara setara dapat memperkuat daya saing ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dalam pembangunan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan prinsip *no one left behind* dan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Di Indonesia, kebijakan pembangunan diarahkan untuk menjamin kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Menurut Suharjuddin (2020) untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dalam pembangunan, diperlukan alat ukur yang dapat menilai perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ukuran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan manusia. Indeks pembangunan gender pertama kali

diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1995 hingga tahun 2009, sebagai pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melihat ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak, namun dengan menekankan perbandingan capaian antara laki-laki dan perempuan.

Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki tiga Dimensi utama, yaitu:

a) Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur Panjang dan hidup sehat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur menggunakan indikator angka umur harapan hidup (*life expectancy*). Jenis data yang digunakan untuk mengukur angka umur harapan hidup, yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).

b) Pengetahuan

Dimensi pengetahuan menunjukkan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pengukuran dimensi ini dilakukan dengan dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka harapan lama sekolah yang digunakan adalah 7 tahun ke atas, karena pada usia tersebut seseorang sudah mulai wajib menjalani pendidikan formal. Sementara itu, untuk

indikator rata-rata lama sekolah batas usianya adalah 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

c) Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil dari meningkatnya kondisi ekonomi. Pengukuran dimensi standar hidup layak dilakukan menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Data pada PNB per kapita belum tersedia sampai tingkat kab/kota, karena itu digunakan pendekatan/proksi yaitu dengan menggunakan data pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi nilai IPG menggunakan angka 100 sebagai nilai patokan, karena angka tersebut menunjukkan nilai rasio yang paling sempurna. Jika nilai IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, jika nilai IPG semakin jauh dari 100, artinya terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

4. Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Kesetaraan gender dalam hubungan keluarga merupakan salah satu pondasi penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Kesetaraan tersebut dapat diwujudkan melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang adil antar anggota keluarga dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, termasuk menjaga dan merawat anak. Pembagian peran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama

dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dalam keluarga (Tanjung et al., 2024).

Menurut Tanjung et al. (2024) kesetaraan gender dalam keluarga juga dapat dilihat dari adanya kesamaan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Akses yang setara dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota keluarga untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan pengembangan diri tanpa membedakan jenis kelaminnya. Partisipasi menunjukkan bahwa semua anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga maupun dalam pengambilan keputusan. Kontrol dan manfaat mencerminkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam menentukan keputusan serta memperoleh manfaat secara adil dari hasil yang ingin dicapai bersama.

Hubungan keluarga yang harmonis dapat terwujud apabila relasi gender dalam keluarga berjalan dengan baik. Tanjung et al. (2024) menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komitmen, kebersamaan, komunikasi yang baik, serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam keluarga. Dengan adanya kesetaraan gender, hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih seimbang, saling menghargai dan mampu menciptakan suasana yang aman dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak hanya memperkuat hubungan keluarga, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun keharmonisan dalam keluarga.

2.1.3 *Well-Being* (Kesejahteraan)

Well-being atau kesejahteraan merupakan kondisi yang menggambarkan kualitas hidup seseorang secara menyeluruh. Menurut *American Psychological Association* (APA), *Well-being* atau kesejahteraan ditandai oleh perasaan bahagia, kepuasan hidup, tingkat stres yang rendah, kesehatan fisik dan mental yang baik. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari *objective well-being* seperti pendapatan atau pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dilihat dari bagaimana individu menilai dan merasakan kehidupannya (*subjective well-being*) (OECD, 2013).

Pendekatan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) merupakan penilaian individu terhadap kualitas hidupnya yang mencakup kepuasan hidup dan perasaan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (Diener, 2000). Di Indonesia, pengukuran kesejahteraan subjektif dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui indeks kebahagiaan, yang digunakan untuk melihat tingkat kebahagiaan atau kepuasan hidup di masyarakat (BPS, 2021). Indeks kebahagiaan disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*) dan makna hidup (*eudaimonia*).

a) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*)

Dimensi kepuasan hidup terdiri dari dua sub bab dimensi, yaitu kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Subdimensi ini mencakup 10 aspek dalam kehidupan manusia yang penting yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesehatan fisik dan mental, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan

sosial, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan, serta kondisi rumah dan fasilitas rumah.

b) Dimensi Perasaan (*Affect*)

Dimensi perasaan terbagi menjadi tiga indikator, yaitu perasaan senang, tidak khawatir/cemas dan tidak tertekan.

c) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*)

Dimensi makna hidup mencakup enam indikator, yaitu kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup dan penerimaan diri.

Ketiga indikator tersebut diukur dengan skala 0-100. Semakin tinggi angka yang diperoleh disuatu daerah, maka tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan di wilayah tersebut juga semakin meningkat.

Dari ketiga dimensi, kepuasan hidup (*life satisfaction*) menunjukkan penilaian individu terhadap berbagai aspek kehidupan yang dijalani. Dalam dimensi ini, salah indikator yang digunakan adalah keharmonisan keluarga, yang mencerminkan tingkat kepuasan individu terhadap hubungan dalam keluarga. keharmonisan keluarga termasuk dalam komponen kepuasan hidup yang menjadi bagian dari indeks kebahagiaan dan diukur dalam skala 0-100.

2.1.4 Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Kehidupan keluarga yang harmonis adalah impian dan keinginan setiap keluarga. Ini tidak hanya mencerminkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk kehidupan

keluarga yang berkualitas. Menurut Gunarsa (dalam Sholihah & Saidiyah, 2020), keharmonisan keluarga adalah keadaan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta adanya penerimaan terhadap kondisi dan keberadaan diri mereka sendiri, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Suasana keluarga yang harmonis juga ditandai dengan adanya ketenang, kasih sayang, serta sikap saling membantu dan bekerja sama antar anggota (Qaimi dalam, Sholihah & Saidiyah, 2020).

Menurut Daradjad (dalam Oktarizal et al., 2022) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga merupakan keadaan ketika anggota keluarga mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, serta membangun hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang, komunikasi yang baik dan saling pengertian sehingga terciptanya kesejahteraan lahir dan batin. Sejalan dengan itu, Pahlawati (2019) menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga bersifat dinamis dan memerlukan peran aktif setiap anggota keluarga dalam menjaga keselarasan hubungan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka keharmonisan keluarga dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu keadaan di mana seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan, saling menghormati, memahami, serta mampu menjalankan peran dan tanggung jawab secara seimbang. Keharmonisan dalam keluarga ditandai oleh adanya kasih sayang, komunikasi yang baik, kerja sama, serta tercapinya keselarasan dalam aspek fisik, mental dan sosial sehingga keluarga dapat mencapai kesejahteraan lahiriah dan batiniah.

2. Pengukuran Keharmonisan Keluarga

Dalam penelitian ini, keharmonisan keluarga tidak diukur menggunakan skala psikologis seperti *Family Harmony Scale* (FHS), melainkan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui indeks kebahagiaan. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu indikator dalam dimensi kepuasan hidup yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan subjektif masyarakat. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan hidup individu terhadap kondisi hubungan dalam keluarga.

Pengukuran keharmonisan keluarga dalam indeks kebahagiaan dapat diukur dalam bentuk nilai indeks dengan skala 0-100, di mana:

1. Nilai yang mendekati angka 100 mencerminkan tingkat keharmonisan keluarga yang semakin baik.
2. Nilai yang semakin menjauh dari angka 100 mencerminkan tingkat keharmonisan keluarga yang relatif rendah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ramadani et al. (2025) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender terhadap keharmonisan keluarga di Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *ex-post facto*. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan kuesioner dengan skala likert terhadap 214 kepala keluarga yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, serta uji regresi untuk melihat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kesetaraan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap keharmonisan keluarga, dengan kontribusi sebesar 2,3%, sementara sisanya sebesar 97.7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Tazkiya & Puspitawati (2022) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan pada keluarga utuh selama pandemi Covid-19 di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 128 responden yang dipilih menggunakan teknik non-probability purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferensial, serta uji regresi linear berganda dan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian pernikahan dan kemitraan peran gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Selain itu, kemitraan peran gender juga berperan sebagai variabel mediator dalam meningkatkan kepuasan pernikahan.

Haryati (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kebahagiaan, penerimaan diri dan keharmonisan keluarga di Indonesia. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data cross-section yang bersumber dari Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (STPK) tahun 2021 yang dilakukan oleh badan pusat statistik dengan jumlah sampel sebanyak 74.648 responden yang tersebar dari 34 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan *Ordinary Least Square* (OLS) dan ordered probit dengan memasukkan berbagai variable control seperti pendapatan, status perkawinan, kesehatan dan karakteristik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keharmonisan keluarga, di mana individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat keharmonisan keluarga yang lebih baik dibandingkan individu yang berpendidikan rendah.

Liang & Zhang (2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepuasan pernikahan di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan data Chinese General Social Survey (CGSS) tahun 2018 dengan jumlah sampel sebanyak 8.187 responden. Metode analisis yang digunakan adalah model probit serta pendekatan instrumental variable untuk mengatasi masalah endogenitas. Variabel pendidikan diukur berdasarkan tingkat pendidikan individu, sedangkan kepuasan pernikahan diproksikan melalui tingkat kebahagiaan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Pendidikan juga memengaruhi kepuasan pernikahan melalui peningkatan pendapatan dan kematangan spiritual individu. Peningkatan kepuasan pernikahan dapat mencerminkan kualitas yang baik dalam rumah tangga.

Jafar et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul penyebab ketidakharmonisan keluarga di Sulawesi Selatan Periode 2007-2021, menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap ketidakharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan data time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pengadilan tinggi agama makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakharmonisan keluarga, yang berarti kondisi ekonomi

memiliki peran dalam mempengaruhi stabilitas dalam rumah tangga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu pendapatan rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak selalu menjadi penentu utama dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor ekonomi terhadap keharmonisan keluarga masih menunjukkan hasil yang beragam.

